

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial	13
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cybercrime</i>	18

1. Jenis-Jenis <i>Cybercrime</i> dan Kaitanya dengan <i>Cybergambling</i>	19
2. <i>Cybercrime</i> sebagai Kejahatan Transnasional	28
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Cybergambling</i> (Judi Dunia Maya)	32
1. <i>Cybergambling</i> Sebagai Kejahatan Transnasional	35
2. Pengaturan <i>Cybergambling</i> (Judi Dunia Maya) di berbagai Negara	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Bahan atau Materi Penelitian	41
1. Sifat dan Jenis Penelitian	41
2. Jenis dan Sumber Data	45
3. Lokasi Penelitian	48
4. Penentuan Responden dan Narasumber	49
B. Alat Penelitian	50
1. Teknik Pengumpulan Data	50
2. Alat Pengumpulan Data	51
C. Jalannya Penelitian	52
1. Tahap Persiapan	52
2. Tahap Pelaksanaan	53
3. Tahap Penyelesaian	53
D. Analisis Hasil Penelitian	54
1. Analisis Kualitatif	54
2. Analisis Deskriptif	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Modus Operandi Kejahatan <i>Cybergambling</i> Transnasional	55
1. Sejarah Perkembangan Modus Operandi Judi Hingga Era <i>Cybergambling</i> Transnasional di Indonesia	56
2. Karakter pada <i>Cybergambling</i> sehingga tidak lagi berstatus sebagai Judi Konvensional	69
3. Modus Operandi <i>Cybergambling</i> Transnasional	72
a. Model Transaksi dalam <i>Cybergambling</i>	72
b. Transaksi Keuangan dalam <i>Cybergambling</i> Transnasional	82
c. Modus Operandi Pencucian Uang dalam Transaksi <i>Cybergambling</i> Transnasional	88
d. Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Pekerja Dalam <i>Cybergambling</i> Transnasional	90
B. Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Terhadap <i>Cybergambling</i> Yang Bersifat Transnasional di Indonesia	93
1. Pengaturan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial di Indonesia	93
a. Doktrin tentang Yurisdiksi dalam Internet	93
b. Pengaturan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam Hal Informasi dan Transaksi Elektronik	96
2. Penerapan Prinsip Yurisdiksi Ekstrateritorial Terhadap <i>Cybergambling</i> Transnasional di Indonesia	106

a. Ekstradisi	107
b. Mutual Legal Assistance atau Bantuan Hukum Timbal Balik	123
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136